

# KONFLIK POLITIK SOEKARNO DAN BUYA HAMKA PADA TAHUN 1962-1970

**Viska Septiani, Drs. Ridwan Melay. M.Hum , Bunari. M.Si**  
Email: viskaseptiani00@gmail.com, Ridwanmelay@yahoo.com,  
Bunari1975@gmail.com

*History Study Program of History  
Department of Social Sciences Education  
Faculty of Teacher Training and Education  
Riau University*

**Abstract :** *Soekarno-Buya Hamka are two great figures whose services to the nation of Indonesia can not be forgotten because they have incised their black and white color for the history of RI (wkkw ini kalimat perumpamaannya ya? Gatau aku bagusnya buat apa). As an ordinary human being, Soekarno-Buya Hamka are not a perfect. Therefore, these two friendly figures also have flaws despite of their superiority. Both Soekarno and Buya Hamka have the principle of fighting for the Indonesian nation by taking the independence of Indonesia from the hands of invaders. Though they have different thoughts in politic, they still keep in touch. The purpose of this research is to know the beginning of Soekarno-Buya Hamka's meeting, the Soekarno-Buya Hamka intimacy period, the cause of the Soekarno-Buya Hamka political conflict, and the end of the dispute between the two sides of Soekarno-Buya Hamka. This research method is historical method. There 3 stages of this research, they are heuristics, interpretation, and historiography. This method can produce work that can be consumed to improve the knowledge about Soekarno-Buya Hamka conflict in 1962-1970. The result of this research is Soekarno-Buya Hamka conflict happened in guided democracy. In this era, Soekarno thrown Hamka to prison for two years and four months. Soekarno did not hate Buya Hamka, nor did Buya Hamka. When President Soekarno died, Soekarno requested Buya Hamka's willingness to do congregational prayer for his body. The author's recommendation is to expect the readers to refine the results of this research (it's a thesis vis, not a scientific work (karya ilmiah) anymore), and to continue this research so that it becomes a continuous research.*

**Keywords:** *Conflict, Politics, Soekarno-Buya Hamka*

## **KONFLIK POLITIK SOEKARNO DAN BUYA HAMKA PADA TAHUN 1962-1970**

**Viska Septiani, Drs. Ridwan Melay. M.Hum , Bunari. M.Si**

Email: viskaseptiani00@gmail.com, Ridwanmelay@yahoo.com, Bunari1975@gmail.com

Contact: 081365217797

Program Studi Pendidikan Sejarah  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Latar belakang skripsi ini adalah Soekarno-Buya Hamka merupakan dua tokoh besar yang jasanya kepada bangsa Indonesia tidak bisa dilupakan begitu saja, karena mereka telah menorehkan warna hitam putihnya bagi sejarah RI. Sebagai seorang manusia biasa Soekarno-Buya Hamka bukanlah manusia yang sempurna, oleh karenanya kedua tokoh yang bersahabat ini mempunyai kekurangan dibalik kelebihan yang dimiliki keduanya. Soekarno dan Buya Hamka dimana mereka sama-sama mempunyai prinsip memperjuangkan bangsa Indonesia dengan cara merebut kemerdekaan RI dari tangan penjajah. Walaupun mereka berbeda paham tentang politik. Namun didalam hati mereka tetap menjalin silaturahmi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui awal pertemuan Soekarno-Buya Hamka, Masa keakraban Soekarno-Buya Hamka, penyebab terjadinya konflik politik Soekarno-Buya Hamka, dan akhir perselisihan antara kedua belah pihak Soekarno-Buya Hamka. Metode penelitian ini adalah metode sejarah. Yang semuanya ada 3 tahap yaitu heuristik, interpretasi, dan historiografi. Sehingga nantinya bisa menghasilkan karya yang bisa dikonsumsi untuk menambah ilmu tentang konflik Soekarno-Buya Hamka Pada Tahun 1962-1970. Hasil penelitian adalah penelitian ini memperoleh hasil bahwa konflik Soekarno-Buya Hamka pada masa demokrasi terpimpin. Dimana pada waktu itu Soekarno yang pernah menjebloskan Hamka ke penjara selama dua tahun empat bulan. Soekarno tidak membenci Buya Hamka, begitu pula Buya Hamka pun tidak ada merasa dendam terhadap Soekarno. Saat Presiden Soekarno wafat, Soekarno meminta kesediaan Buya Hamka menyolatkan jenazahnya. Rekomendasi penulis adalah mengharapkan dengan sepenuh hati kepada pembaca agar dapat menyempurnakan lagi hasil penulisan karya ilmiah ini, serta meneruskan lagi penulisan karya ilmiah ini yang penulis angkat sehingga menjadi karya ilmiah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik, Politik, Soekarno-Buya Hamka

## PENDAHULUAN

Konflik merupakan salah satu konsep dasar ilmu politik, sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa terlepas dari interaksi dengan orang lain utamanya dalam pemenuhan hasrat maupun tujuannya. Akan tetapi, sebagai makhluk yang memiliki hawa nafsu dan emosi, dalam interaksi sosial di kehidupan sehari-hari sering kita temui adanya pertentangan dalam masyarakat, baik antar individu maupun antar kelompok atau golongan. Karena memang, pada hakikatnya manusia akan senantiasa berkonflik dan dihadapkan dengan perbedaan satu dengan lainnya. Sehingga dapat dikatakan konflik adalah pertentangan oleh karena terjadi perbedaan kepentingan antara dua atau lebih, baik individu maupun kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dan berusaha menjadi dominan atas pihak lain.

Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu; politikos yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Dimana proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Konflik politik dalam suatu negara sering kali terjadi, pengertian konflik politik samasaja dengan pengertian konflik pada umumnya. Akan tetapi dalam ruang lingkup, isu, dan aktor yang terlibat menjadi pembeda dengan konflik pada umumnya. Konflik politik lebih mengarah pada *conflict of interest* atau konflik kepentingan.

Ir. Soekarno (Bung Karno) dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) adalah dua sosok yang tidak akan lepas dari sejarah perjuangan bangsa merebut kemerdekaan RI dari tangan penjajah. Mereka adalah pejuang, pendiri negara (*founding father*), Bapak-bapak bangsa, dan sekaligus juga adalah pahlawan bangsa. Mereka adalah sosok yang penuh dedikasi berpikir dan berbuat tanpa pamrih untuk bangsa dan negara. Bung Karno banyak terlibat dalam pergerakan kemerdekaan melalui jalur politik dan diplomasi, sementara Buya Hamka adalah seorang ulama pejuang, yang berjuang melalui jalan dakwah. Buya Hamka adalah salah satu tokoh yang berasal dari tanah Minang. Sama seperti Hatta yang merupakan Dwitunggal Ir. Soekarno, Buya Hamka juga merupakan salah seorang sahabat karib Soekarno. Persahabatan antara Soekarno dan Buya Hamka terjalin pada saat Buya Hamka mengunjungi Soekarno di tempat pengasingannya di Bengkulu tahun 1941.

Pada sidang tahun 1957, Hamka menyampaikan pidato yang menolak gagasan Presiden Soekarno yang ingin menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin. Gagasan demokrasi terpimpin seolah menjadi "Mantra Sakti", alat penindas oposisi bernama ideologi Nasionalisme-Agama-Komunisme (Nasakom). Soekarno dengan angkuh mulai menggali kuburan bagi lawan-lawan politiknya. Dewan Konstituante kemudian dibubarkan oleh Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959. Soekarno kemudian juga membubarkan Masyumi dengan menyatakannya sebagai partai terlarang pada 1960.<sup>1</sup>

Perseteruann antara Soekarno dengan Buya Hamka terus berlanjut. Pada Agustus 1960, dimana diterbitkannya majalah "Panji Masyarakat" oleh K.H. Fakhri Usman dan Buya Hamka diterbitkannya sebagai corong dakwah Islam dibredel, yang memuat karangan Muh. Hatta dengan judul "Demokrasi Kita" yang mana tulisan tersebut berisikan tentang menolak terang-terangan tentang Demokrasi Terpimpin,

---

<sup>1</sup>Badruzzaman Busyairi, Mengenang 100 Tahun Hamka (Jakarta: YPI Al-Azhar, 2008), 37.

hingga Soekarno merasa posisinya terancam. Puncaknya pada tahun 1964-1966, dengan tuduhan melanggar Undang-undang Anti-Subversif pempres No. 11 yaitu tuduhan merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Selama masa penahanan Buya Hamka menjalani hari-hari yang cukup berat karena ia harus menjalani masa-masa interogasi yang berlangsung secara sepihak tanpa adanya pertimbangan keadilan.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melihat dan ingin mengetahui secara dalam yang kemudian penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :**KONFLIK POLITIK SOEKARNO DAN BUYA HAMKA PADA TAHUN (1962-1970).**

## **METODE PENELITIAN**

Jenis metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena dengan metode kualitatif sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya. Dalam metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Metode ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.

Dalam penelitian sejarah, metode historis adalah sekumpulan prinsip/ aturan yang memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan kata atau bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dan hasil-hasilnya dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini diperlukan proses mencari dan menemukan sumber, di uji dan dinilai secara kritik intern, data dan fakta di rangkai kemudian di inpretasikan dan di tuangkan dalam penulisan sejarah.

Tempat melakukan penelitian ini dilakukan dengan kunjungan ke Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka yang bertempat di Kampung Muaro Pauh, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat. Penulis juga mengunjungi Perpustakaan Soeman HS, Perpustakaan Universitas Riau dan perpustakaan Kota Dumai untuk mendapatkan informasi (buku-buku) yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Waktu penelitian ini dimulai pada saat disahkannya SK Dekan FKIP Universitas Riau.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pertemuan Soekarno dan Buya Hamka**

Saat itu Bengkulu masih dijajah oleh bangsa Belanda. Presiden Soekarno diasingkan di daerah Bengkulu selama 3 tahun. Meski diasingkan, gerak-geriknya membangkitkan warga untuk merdeka dari penjajahan bangsa asing terus dilakukannya. Dia selalu mencari celah untuk memotivasi rakyat Bengkulu untuk merdeka. Meskipun lama diasingkan di Bengkulu, tidak banyak dari warga Bengkulu yang tahu apa yang telah dilakukannya. Karena Soekarno melakukan gerakannya

secara baik dan tersembunyi.<sup>2</sup> Soekarno pindah ke Bengkulu dan tinggal disebuah bangunan klasik yang di bangun oleh Tjang Tjeng Kwat yang bekerja sebagai penyalur bahan pokok keperluan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Bengkulu. Pada tahun 1938, rumah ini dijadikan rumah pengasingan Soekarno sebagai tahanan politik kala itu. Semasa di rumah pengasingan ini, Soekarno banyak melakukan diskusi, merancang bangunan, pentas seni, dan lainnya.<sup>3</sup>

H. Abdul Karim Oei (Oei Tjing Hin), mengajak Soekarno Konsul Muhammadiyah Bengkulu, dan inilah awal mula pertemuan Presiden Soekarno dan Buya Hamka ditempat pengasingannya Bengkulu. Dalam pertemuan selama lebih kurang 2 jam itu, hubungan antara Soekarno dan Buya Hamka pun menjadi akrab dan dekat.

### **Masa Keakraban Soekarno dan Buya Hamka**

Pada tahun 1946, saat Presiden Soekarno telah diangkat menjadi presiden RI pertama, Soekarno mengajak Buya Hamka untuk pindah ke daerah Jakarta. Pada tanggal 18 Desember 1949, Hamka menjajakan kakinya di Jakarta. Sebagai kota besar dan pusat Pemerintahan. Bagi Hamka, Jakarta mempunyai daya tarik tersendiri dan menjanjikan berjuta harapan. Hamka dengan bakat jurnalistiknya diterima menjadi koresponden harian "Merdeka" dan "Pemandangan". selain itu, Hamka juga tertarik untuk menerjunkan dirinya dalam dunia politik praktis dengan menjadi anggota Partai Islam Masyumi.<sup>4</sup> Dalam anggaran dasar Masyumi ditegaskan secara jelas, bahwa tujuan Partai ini adalah terlaksananya ajaran dan hukum Islam didalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan Negara RI menuju ke ridhoan *Illahi*.<sup>5</sup>

Masyumi memegang prinsip bahwa negara harus melakukan kekuasaannya atas dasar musyawarah dengan perantaraan wakil-wakil rakyat yang dipilih. Kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, kemerdekaan, persamaan, lapang dada, dan keadilan sosial yang diajarkan oleh Islam harus terlaksana sepenuhnya. Kaum Muslimin mendapat kesempatan untuk mengatur perikehidupan pribadi dan masyarakat sesuai dengan ajaran dan hukum-hukum Islam sebagaimana tercantum dalam *Al-Quraan* dan *Sunnah*.<sup>6</sup> Politik di Indonesia kian hari bertambah panas. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno selaku Pimpinan Pemerintahan mengeluarkan dekrit dan bertekad melaksanakan Sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

Pada mulanya sistem ini dapat berjalan lancar. Namun lambat laun pemerintahan ini dimasuki dan dipengaruhi Partai Komunis Indonesia (PKI). Sehingga pada akhirnya perjalanan Sistem Pemerintahan ini diselewengkan untuk kepentingan PKI. Maka dari itu, Pancasila dan UUD 1945 tidak lebih

---

<sup>2</sup>LP2KS, "Hari-Hari Bung Karno Ketika Diasingkan di Bengkulu", diakses dari <https://adekabang.wordpress.com/2011/06/30/hari-hari-bung-karno-ketika-diasingkan-di-bengkulu> pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 13.08

<sup>3</sup> Made Asdhiana, "Mengunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno Di Ende" diakses dari <https://news.rumah> pengasingan-bungkarno pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 13.22

<sup>4</sup>Tim Narasi, 100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia (Yogyakarta: PT Buku Kita, 2009), hlm82

<sup>5</sup> Ahmad Syafii Maarif (1987) dalam Waluyo, Dari "Pemberontak" Menjadi Pahlawan Nasional. (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm 69

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 69

hanyalah simbol dan semboyan kosong belaka, tanpa mempunyai makna apa-apa.<sup>7</sup> Saat Hamka menjadi Anggota Konstituante. Sejak saat itu, hubungan akrab dengan Soekarno mulai renggang karena perbedaan ideologi yang harus diperjuangkan. Presiden Soekarno ingin mempertahankan Negara berdasarkan Pancasila. Sedangkan Hamka segenap Fraksi partai Islam memperjuangkan Negara berdasarkan Islam. Hubungan dua orang seperti bersaudara itupun akhirnya terputus.

## **B. Konflik Soekarno dan Buya Hamka**

Sejak pelantikan anggota Konstituante pada tanggal 10 November 1956 hingga sidang Konstituante yang terakhir tanggal 2 Juni 1959. Panitia persiapan Konstitusi mengadakan rapat antara dua sidang Pleno. Pada tahun 1958 jumlah sidang pleno lebih sedikit dibandingkan pada tahun 1957 karena sidang pleno telah berhasil mengambil keputusan tentang pasal-pasal yang akan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Badan tertinggi adalah Presiden Ir. Soekarno yang berdasarkan sejarah Proklamasi berhak dan wajib menolak rancangan UUD jika dianggap bertentangan dengan makna dan isi Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 5 Juli pukul 17.00 Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana merdeka. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan pernyataan yang membenarkan dekrit tersebut dengan membubarkan Badan Konstituante hasil Pemilu 1955.<sup>8</sup>

Negara berada dalam kekacauan politik membuat Presiden Soekarno mengambil keputusan dengan cepat dalam menyelamatkan negara. Posisi Presiden Soekarno sebagai pemimpin Negara, mulai memuncak pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan dukungan Angkatan Bersenjata, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dalam upacara resmi di Istana Negara. Salah satu isi dari Dekrit ini adalah pembubaran Konstituante karena kegagalan badan ini dalam membentuk undang-undang yang baru. Pembubaran Konstituante ini menandai berlakunya UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin.<sup>9</sup> Pada periode Pemerintahan Indonesia tahun 1959-1965 kekuasaan didominasi oleh Presiden, terbatasnya peranan Partai Politik, berkembangnya pengaruh Komunis dan makin meluasnya peranan TNI/POLRI sebagai unsur sosial politik. Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadibanyakpenyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 antara lain pembentukan Nasionalis-Agama Dan Komunis (NASAKOM) TAP MPRS No.III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai "Presiden Seumur Hidup", dalam Demokrasi Terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dalam sidang Legislatif maka permasalahan itu diserahkan kepada Presiden.<sup>10</sup>

Ketika presiden Soekarno larut dalam perkawinan Nasionalis, Agama dan Komunis atau yang pada masa itu disebut sebagai NASAKOM, seorang ulama besar tanah air atau yang dikenal dengan sebutan Buya Hamka justru terang-terangan menentang itu. Hamka pada masa orde lama begitu memusuhi NASAKOM karena

---

<sup>7</sup>Fachri, Ali, Hamka Dan Masyarakat Islam Indonesia ( Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm 98

<sup>8</sup>Nazarudin Sjamsuddin, Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm 188-190

<sup>9</sup>Nugroho Notosusanto, Pejuang dan Prajurit (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm 99-100

<sup>10</sup>Chotib, dkk., Kewarganegaraan 2, Menuju Masyarakat Madani SMA kelas XI ( Jakarta: Yudhistira, 2002), hlm 34-35

menurutnya “orang yang bertuhan tidak akan pernah bisa beriringan dengan mereka yang mengingkari keberadaan Tuhan”. Suara pikirannya ini terus menerus ia sampaikan setiap kali ada kesempatan berceramah di seluruh pelosok Indonesia. Bagi Buya Hamka tegak berdirinya suatu negara atau kekuasaan dimulai sejak manusia mengenal bermusyawarah dan bernegara. Dimana kekuasaan dari segala bentuknya adalah milik Allah yang telah menjadikan manusia sebagai pemimpin atau khalifah dalam menjalani kekuasaan yang dibarengi dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT dalam nas. Dalam keyakinan Islam, manusia mengatur negara bersama-sama atas kehendak Tuhan. Pengangkatan Presiden, sultan, raja harus berada dibawah kekuasaan Tuhan yang dijelaskan dalam nas. Hamka menyebutnya dengan ”*Demokrasi Taqwa*”. Majunya negara manakala masyarakatnya memegang teguh peraturan-peraturan Allah, dan runtuhnya negara manakala masyarakatnya meninggalkan peraturan-peraturan Allah. Menurut pandangan Hamka hubungan antara Islam dan negara adalah satu kesatuan.<sup>11</sup>

Namun, pernyataan Buya Hamka ditentang keras oleh Soekarno. Ia menuntut agar ada pemisahan yang tegas antara agama dan kekuasaan politik. Menurut Soekarno negara disusun atas dasar negara nasional yang meliputi seluruh negara indonesia, jika didirikan negara berdasarkan Islam maka banyak daerah-daerah yang penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri seperti Maluku, Bali, Flores, Timor, dan Juga Irian Barat. Dari pernyataan tersebut, walaupun Soekarno berfungsi sebagai kepala negara konstitusional, namun Soekarno mempunyai pilihan sendiri dalam soal negara. Ia tidak bisa menahan diri ketika para pemimpin Islam mengemukakan bahwa Islam merupakan ajaran yang berada diatas ajaran apapun termasuk Pancasila.<sup>12</sup>

Pendapat Buya Hamka dianggap sebagai ancaman oleh Presiden Soekarno. Dengan kekuasaannya yang masih kuat saat itu, Soekarno memerintahkan penahanan Buya Hamka. Kemudian Buya Hamka harus menjalani kehidupan sebagai tahanan hingga orde lama tumbang dan berganti dengan orde baru. Saat orde baru, Soekarno justru menjadi tahanan kota, ia sangat menderita dan akhirnya meninggal dalam kondisi terasing didunia politik. Buya Hamka mendengar kabar meninggalnya Soekarno. Beliau tidak berpikir panjang dan langsung datang kerumah duka dan disana Buya Hamka mengimami solat jenazah untuk Soekarno.<sup>13</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan saat terjadi pembubaran konstituante, Indonesia berada dalam kekacauan politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan jelas ini menjadi pertentangan oleh Hamka karena menurut hamka ini jelas bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga ini ancaman bagi Soekarno. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, mengantarkan Soekarno pada kekuasaan tanpa batas, apalagi setelah ia, menelurkan demokrasi terpimpin dan menggelorakan ajaran Nasakom. Akhirnya sampailah puncak kontroversidari kehidupan pemimpin besar revolusi itu. Yakni, ketika meletus G.30 S/PKI yang berbuntut pada kemelut Politik dan ekonomi yang berkepanjangan, dan akhirnya Soekarno terjungkal dari kekuasaannya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Dikutip dari Adib, Shobibul S.Ag.M.S.I, ”Pemikiran Hamka Tentang Politik; Telaah Penafsiran Hamka Dal Tafsir Al-Azhar”, diakses dari <http://islamuna-adib.2010/04/pemikiran-hamka-tentang-politik-telaah.html?m=1> pada tanggal 9 Januari 2018, pukul 11:44

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 69

<sup>13</sup>Purna, Assep, 101 Kisah Inspiratif, (Jakarta: Gagas Media, 2011), hlm 208

<sup>14</sup>Mashad, Dhurorudin, Menggugat Penguasa, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hlm 46

Arogansi kekuasaan mulai terang-terangan di kampanyekan, ketika banyak menentang dengan sistem yang diterapkannya, Soekarno tetap nekat jalan sesuai keinginannya sendiri. Siapapun yang tak segaris dan tidak sependapatnya dengannya akan diasingkan, ditekan, atau bahkan di teror. Pada masa orde lama, pemerintahan yang menerapkan NASAKOM, yang didalamnya sangat bertentangan dengan Pancasila, dalam implementasinya komunis lah yang justru di perlakukan sebagai anak emas.

Pada tahun 1959, Dibubarkannya Konstituante. Sejak itu hubungan akrab Buya Hamka dengan Soekarno mulai renggang. Buya Hamka dengan segenap Partai Islam memperjuangkan negara berdasarkan Islam sedangkan Soekarno ingin mempertahankan negara berdasarkan Pancasila. Fitnah keji disusul dengan penahanan tanpa peradilan itu tak membuat Buya Hamka dendam dengan Soekarno.

### **C. Akhir Perselisihan Antara Soekarno dan Buya Hamka**

Setelah dikeluarkannya keputusan Presiden No. 128 tahun 1960 yang menyatakan Masyumi tidak diakui dan dibubarkan. Pada awalnya Masyumi, PNI, dan PSI merupakan pilar pemerintah. Ketiga partai tersebut secara bergantian memegang tampuk kepemimpinan dan selalu menempatkan tokoh-tokohnya kedalam kabinet. Posisi Masyumi dan PSI mulai bergeser pada saat PKI mulai bangkit dan mempengaruhi pandangan Presiden Ir. Soekarno yang hendak menyatukan seluruh kekuatan negara dari unsur Nasionalis, Agama, dan Komunis. Pertentangan antara Presiden Ir. Soekarno dengan Masyumi dan PSI semakin terbuka saat kedua partai tersebut menolak konsepsi Presiden tentang Demokrasi Terpimpin.<sup>15</sup>

Beberapa pemimpin Masyumi dan PSI terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Masyumi yang merupakan partai dengan ideologi Agama Islam sangat menentang kebijakan pemerintah yang mengizinkan pendirian Partai Komunis Indonesia yang jelas-jelas bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 dan Batang Tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Begitu pula PSI yang memiliki Ideologi Sosialis sangat bertentangan dengan Komunis.

Dalam pemilu 1955, Masyumi menjadi partai Islam terkuat dengan menguasai 20,92 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta raya (26,12 persen), Sumatera Utara (37 persen), Kalimantan Barat (33,25 persen), Sulawesi Tenggara Selatan (39,98 persen) dan Maluku (35, 35 persen). Pembubaran Masyumi pada tahun 1960 betul-betul merupakan pukulan telak bagi kekuatan politik Islam. Sebagian wilayah yang ditinggalkan oleh Masyumi memang tetap memiliki karakter sebagai basis masa Islam yang kuat ketika pemilu kembali dilaksanakan secara bebas, seperti Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, kebanyakan dari wilayah lain di pulau Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan

---

<sup>15</sup>Fatkurohman, Pembubaran Partai Politik di Indonesia : Tinjauan Historis Normatif Pembubaran Papol (Malang: Setara Press, 1990), hlm. 99.

Sumatera Utara, telah berubah warna, wilayah ini cenderung menjadi basis partai nasionalis.<sup>16</sup>

Perjalanan politik Masyumi sejak didirikan pada tanggal 7 Nopember 1945 sampai dibubarkan pada tahun 1960 penuh dengan dinamika, baik di dalam internal Masyumi sendiri maupun ketika berhubungan dengan partai politik dan Presiden Ir. Soekarno. Hubungan Masyumi dengan Presiden Ir. Soekarno misalnya, pernah juga mengalami hubungan yang harmonis, terutama pada masa revolusi. Hubungan itu mengalami pergeseran hingga menjurus kepada konflik. Konflik antara Ir. Soekarno dengan Masyumi semakin tajam, terutama sejak adanya keinginan Ir. Soekarno mengubur partai politik pada bulan Oktober 1956, dan konsepsi Presiden pada tahun 1957. Konflik terus berlanjut hingga masa Demokrasi Terpimpin.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Ir. Soekarno membubarkan Masyumi. Pertama, Soekarno ingin merealisasikan pemikiran dan obsesinya yang sudah lama terkubur, terutama mengenai partai politik, demokrasi dan revolusi. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pernyataan dan pemikiran Ir. Soekarno yang sudah berkembang sejak masa pergerakan nasional sampai awal Demokrasi Terpimpin. Pertama, sejak masa pergerakan nasional Ir. Soekarno menginginkan partai politik cukup satu. Bahkan pada bulan Oktober 1956 Ir. Soekarno menyatakan partai politik adalah penyakit, sehingga harus dikubur. Kedua, Ir. Soekarno menginginkan demokrasi yang diterapkan adalah *Democratisch-centralisme*, yakni suatu demokarsi yang memberi kekuasaan pada pucuk pimpinan buat menghukum tiap penyelewengan, dan menendang bagian partai yang membahayakan massa.<sup>17</sup> Partai Masyumi seringkali mengkritisi dan menentang gagasan dan kebijaksanaan Ir. Soekarno. Adanya penentangan dan perlawanan Masyumi yang tidak putus-putusnya kepada Presiden Ir. Soekarno yang semakin mendorong dan menyakinkan Soekarno untuk membubarkan Masyumi. Faktor ketiga adalah untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan melestarikan kekuasaannya. Soekarno khawatir kalau Masyumi tetao dibiarkan hidup, maka akan mengancam kekuasaannya, dan menghambat jalannya Demokrasi Terpimpin.<sup>18</sup>

Buya Hamka adalah salah satu sasaran utama, karena di samping sastrawan non-komunis, beliau juga tokoh besar Muhammadiyah dan Masyumi yang bertentangan dengan PKI. Buya Hamka di tahan 2 tahun 4 bulan lamanya, tidak pernah diadili dan tuduhan itu ternyata palsu. Di dalam tahanan sastrawan ulama besar ini menyelesaikan Tafsir Al Azhar yang monumental itu. Buya Hamka persis akan disiksa ketika Gestapu/Kudeta 1 Oktober 1965 terjadi. Sastrawan senior ini diselamatkan oleh kudeta tersebut. Fitnah keji disusul dengan penahanan tanpa peradilan itu tak pelak adalah puncak ketegangan hubungan antara Buya Hamka dengan Presiden Ir. Soekarno. Padahal, sesuai sifat Buya Hamka yang romantis, secara pribadi Presiden Ir. Soekarno adalah sosok yang dikaguminya dan pernah pula disanjung sedemikian tingginya oleh Hamka.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Setiawan bambang, Pergeseran Kekuatan Partai Nasionalis dan islam, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/15/00145877/pergeseran.kekuatan.partai.nasionalis.dan.islam.1955-2004> pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 20.45

<sup>17</sup>Zainal Muslim A, Sikap Politik Soekarno Terhadap Masyumi Tahun 1957-1960, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (Semarang, 2013), hlm. 77.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 77

<sup>19</sup>*Ibid.*, 318

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Konflik Soekarno dan Buya Hamka merupakan pembelajaran yang baik bagi Pemerintahan yang ada saat ini. Dengan menggali pemikiran-pemikiran kedua Sahabat Karib ini diharapkan nantinya dapat memberikan nilai lebih pada skripsi ini. Soekarno yang seorang sekularis, dan Buya Hamka yang seorang islamis. Perbedaan pandangan politik yang menyebabkan kerenggangan dalam persahabatan tersebut.

Sejarah konflik Soekarno dan Buya Hamka terjadi ketika presiden Soekarno larut dalam perkawinan Nasionalis, Agama dan Komunis atau yang pada masa itu disebut sebagai NASAKOM, seorang ulama besar tanah air atau yang dikenal dengan sebutan Buya Hamka justru terang-terangan menentang itu. Hamka pada masa orde lama begitu memusuhi NASAKOM karena menurutnya “orang yang bertuhan tidak akan pernah bisa beriringan dengan mereka yang mengingkari keberadaan Tuhan”. Suara pikirannya ini terus menerus ia sampaikan setiap kali ada kesempatan berceramah di seluruh pelosok Indonesia.

Pada tahun 1959, Dibubarkannya Konstituante. Sejak itu hubungan akrab Buya Hamka dengan Soekarno mulai renggang. Buya Hamka dengan segenap Partai Islam memperjuangkan negara berdasarkan Islam sedangkan Soekarno ingin mempertahankan negara berdasarkan Pancasila. Fitnah keji disusul dengan penahanan tanpa peradilan itu tak membuat Buya Hamka dendam dengan Soekarno.

Konflik Soekarno dan Buya Hamka semakin memuncak tajam ketika Politik di Indonesia kian hari bertambah panas. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno selaku Pimpinan Pemerintahan mengeluarkan dekrit dan bertekad melaksanakan Sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

Pada mulanya sistem ini dapat berjalan lancar. Namun lambat laun pemerintahan ini dimasuki dan dipengaruhi Partai Komunis Indonesia (PKI). Sehingga pada akhirnya perjalanan Sistem Pemerintahan ini diselewengkan untuk kepentingan PKI. Maka dari itu, Pancasila dan UUD 1945 tidak lebih hanyalah simbol dan semboyan kosong belaka, tanpa mempunyai makna apa-apa. Saat Hamka menjadi Anggota Konstituante. Sejak saat itu, hubungan akrab dengan Soekarno mulai renggang karena perbedaan ideologi yang harus diperjuangkan. Presiden Soekarno ingin mempertahankan Negara berdasarkan Pancasila. Sedangkan Hamka segenap Fraksi partai Islam memperjuangkan Negara berdasarkan Islam. Hubungan dua orang seperti bersaudara itupun akhirnya terputus. Buya Hamka dianggap sebagai ancaman oleh Presiden Soekarno. Dengan kekuasaanya yang masih kuat saat itu, Soekarno memerintahkan penahanan Buya Hamka. Kemudian Buya Hamka harus menjalani kehidupan sebagai tahanan hingga orde lama tumbang dan berganti dengan orde baru. Saat orde baru, Soekarno justru menjadi tahanan kota, ia sangat menderita dan akhirnya meninggal dalam kondisi terasing didunia politik. Buya Hamka mendengar kabar meninggalnya Soekarno. Beliau tidak berpikir panjang dan langsung datang kerumah duka dan disana Buya Hamka mengimami solat jenazah untuk Soekarno.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan hubungan dua orang yang baik itu terputus yakni:

1. Sejak masa pergerakan nasional Ir. Soekarno menginginkan partai politik cukup satu. Bahkan pada bulan Oktober 1956 Ir. Soekarno menyatakan partai politik adalah penyakit, sehingga harus dikubur.
2. Ir. Soekarno menginginkan demokrasi yang diterapkan adalah *Democratisch-centralisme*, yakni suatu demokarsi yang memberi kekuasaan pada pucuk pimpinan buat menghukum tiap penyelewengan, dan menendang bagian partai yang membahayakan massa. Partai Masyumi seringkali mengkritisi dan menentang gagasan dan kebijaksanaan Ir. Soekarno. Adanya penentangan dan perlawanan Masyumi yang tidak putus-putusnya kepada Presiden Ir. Soekarno yang semakin mendorong dan menyakinkan Soekarno untuk membubarkan Masyumi.
3. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan melestarikan kekuasaannya. Soekarno khawatir kalau Masyumi tetap dibiarkan hidup, maka akan mengancam kekuasaannya, dan menghambat jalannya Demokrasi Terpimpin.

Buya Hamka adalah salah satu sasaran utama, karena di samping sastrawan non-komunis, beliau juga tokoh besar Muhammadiyah dan Masyumi yang bertentangan dengan PKI. Buya Hamka di tahan 2 tahun 4 bulan lamanya, tidak pernah diadili dan tuduhan itu ternyata palsu. Di dalam tahanan sastrawan ulama besar ini menyelesaikan Tafsir Al Azhar yang monumental itu. Buya Hamka persis akan disiksa ketika Gestapu/Kudeta 1 Oktober 1965 terjadi. Sastrawan senior ini diselamatkan oleh kudeta tersebut. Fitnah keji disusul dengan penahanan tanpa peradilan itu tak pelak adalah puncak ketegangan hubungan antara Buya Hamka dengan Presiden Ir. Soekarno. Padahal, sesuai sifat Buya Hamka yang romantis, secara pribadi Presiden Ir. Soekarno adalah sosok yang dikaguminya dan pernah pula disanjung sedemikian tingginya oleh Hamka. Konflik Soekarno dan Buya Hamka terbukti memberikan dampak yang tidak sedikit bagi kebijakan politik Indonesia baik itu di dalam bidang politik, ekonomi, agama, maupun social-budaya. Dampak dari konflik tersebut setidaknya mengubah perpolitikan Indonesia.

## Rekomendasi

Walaupun masalah dalam skripsi ini telah selesai diungkapkan, namun penulis sangat mengharapkan pada pecinta atau peminat sejarah untuk mengadakan penelitian lebih mendalam dan melanjutkan penelitian ini, karena masih banyak aspek-aspek lain yang diteliti selanjutnya. Adapun saran-saran penulis adalah:

1. Konflik Politik Soekarno dan Buya Hamka dapat menjadi tolak ukur bagi perbandingan perkembangan politik di Indonesia.
2. Soekarno dan Buya Hamka merupakan bapak-bapak pendiri Republik Indonesia, diharapkan dengan penelitian ini kita bias mengambil pembelajaran, dan tidak menjadikan pertentangan ini untuk memecah persatuan bangsa.
3. Diharapkan bagi masyarakat umumnya, dan khususnya mahasiswa agar mampu mewarisi dan melestarikan perjuangan dan pengorbanan kedua tokoh *the founding father* ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Shobibul S.Ag.M.S.I, "Pemikiran Hamka Tentang Politik; Telaah Penafsiran Hamka Tafsir Al-Azhar", <http://islamuna-adib.2010/04/pemikiran-hamka-tentang-politik-telaah.html?m=1> (diakses 9 Januari 2018).
- Agamkab.Go.Id,PortalResmiKabupatenAgam,Http://Www.Agamkab.Go.Id/Agamkab/Profil, (diakses 14 Mei 2018).
- Ahmad Syafii Maarif, 2009. dalam Waluyo, *Dari "Pemberontak" Menjadi Pahlawan Nasional*. Ombak. Yogyakarta.
- Badruzzaman Busyairi, 2008. *Mengenang 100 Tahun Hamka*. YPI Al-Azhar, Jakarta.
- Chotib, dkk., 2002. *Kewarganegaraan 2, Menuju Masyarakat Madani SMA kelas XI*. Yudhistira. Jakarta.
- Dany Haryanto,S.S.,M.A. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Prestasi Pustakarya. Jakarta.
- Fachri, Ali, 1983. *Hamka dan Masyarakat Islam Indonesia* . Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Fajar Putra Dewanto, 2008. *Upaya Memahami dan Memetakan Konflik*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Fatkurohman, 1990. *Pembubaran Partai Politik di Indonesia : Tinjauan Historis Normatif Pembubaran*. Brawijaya press. Jakarta.
- Fisher, Simon, dkk., 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, PT. The British Council Indonesia, Jakarta.
- Hamka, 1982. *Kenangan-Kenangan Hidup*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Hamka, 1983. *Lembaga hidup*. Pustaka Panji Mas. Jakarta.
- Hamka, irfan, 2013. *Ayah Kisah Buya Hamka*. Republika. Jakarta.
- Hidayat, Imam. 2009. *Teori-teori Politik*. Setara Press. Malang.

Pruit G Dean & Rubin Z Jeffray, 2004. *Teori Konflik Social*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

LP2KS, "Hari-Hari Bung Karno Ketika Di asingkan di Bengkulu" ,<https://adekabang.wordpress.com/2011/06/30/hari-hari-bung-karno-ketika-diasingkan-di-bengkulu> (diakses 14 Mei 2018).

Made Asdhiana, "Mengunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno Di Ende" <https://news.rumah-pengasingan-bungkarno> (diakses 14 Mei 2018).

Mashad, Dhurorudin, 1999. *Menggugat Penguasa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nazarudin Sjamsuddin, 1988. *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Rajawali Pers, Jakarta.

Nugroho Notosusanto, 1991. *Pejuang dan Prajurit*. Sinar Harapan. Jakarta.

Purna, Assep, 1999. *101 Kisah Inspiratif*. Gagas Media. Jakarta. Rauf, Maswadi, 2001. *Konsensus dan Konflik Politik*. DIKTI. Jakarta.

Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Agam, "Luas Wilayah Dan Batas Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2016".

[https://sipd.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/rkpd\\_78\\_2016.pdf](https://sipd.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/rkpd_78_2016.pdf), ( diakses 13 mei 2018).

Rosyada Dede, Ubaidillah A, Rozak Abdul, dkk, 2003. *Demokrasi hak asasi manusia dan masyarakat madani*. Prenada media, Jakarta.

Setiawan bambang, Pergeseran Kekuatan Partai Nasionalis dan islam, <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/15/00145877/pergeseran.kekuatan.partai.nasionalis.dan.islam.1955-2004> (diakses 15 April 2018).

Subhan, Muhammad. "Menelusuri Jejak Hamka di Maninjau Nan Memukau". Kompasiana. [https://id.wikipedia.org/wiki/Museum\\_Rumah\\_Kelahiran\\_Buya\\_Hamka](https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Rumah_Kelahiran_Buya_Hamka)( diakses 12 mei 2018).

Tim Narasi, 2009. *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia*. Buku Kita. Yogyakarta.

Wina Sanjaya, 2012. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Kencana. Jakarta

Wina Sanjaya, 2012. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Kencana. Jakarta.

Zainal Muslim A, 2013. *Sikap Politik Soekarno Terhadap Masyumi Tahun 1957-1960*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.